

**ANALISIS PERHITUNGAN SUBSIDI PUPUK TAHUN 2019
DAN 2020 PADA PT PETROKIMIA GRESIK**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

SAFIERA INSAN KHAMILIA

NIM: 151910613007

PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Gresik, 15 Maret 2022

Penulis



Safiera Insan Khamilia

151910613007

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN SUBSIDI PUPUK TAHUN 2019 DAN 2020
PADA PT PETROKIMIA GRESIK**

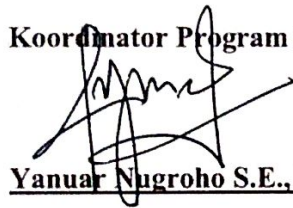
Disusun oleh:

Safiera Insan Khamilia

151910613007

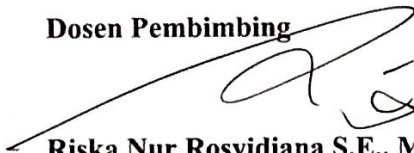
Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Akuntansi



Yanuar Nugroho S.E., M.Sc., Ak., CA., ACP., AWP., CRA. Tanggal 19-07-2022
NIP. 199001132015043101

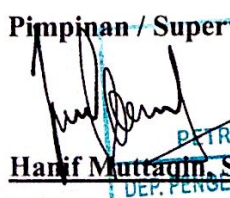
Dosen Pembimbing



Riska Nur Rosyidiana S.E., M.Ak., CRA., CAPF.
NIP. 198704252016033201

Tanggal 19-07-2022

Pimpinan / Supervisor



Hanif Muttakin, S.A.

T555632

Tanggal 19-07-2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga serta syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Akuntansi.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan bimbingan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'ruf drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc. Ak., CA., ACPA., AWP., CRA. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.
3. Ibu Riska Nur Rosyidiana S.E., M.Ak., CRA., CAPF., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan masukan untuk Tugas Akhir ini.
4. Seluruh dosen Departemen Bisnis Fakultas Vokasi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh agar berjuang menuntut ilmu di Universitas Airlangga.
6. Teman teman yang selalu mengingatkan dan membantu laporan ini.
7. Sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah dan menemani mengerjakan laporan ini.
8. Rekan kerja di Sekaruang yang senantiasa memberikan waktu luang saat bekerja untuk menyelesaikan laporan ini, memberikan semangat, menghibur, dan memberikan kopi gratis setiap harinya.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kesalahan serta jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas

Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menambah wawasan terkait topik yang diambil untuk Tugas Akhir ini.

Gresik, 5 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'S', 'I', and 'K'.

Safiera Insan Khamilia

ABSTRAK

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi pupuk dan produksi non pupuk hasil diversifikasi dan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia. Subsidi pupuk mengalami peningkatan hingga 8,5% per tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Perusahaan menggunakan perhitungan subsidi pupuk yang besarnya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan subsidi pupuk yang terdapat di PT Petrokimia Gresik. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Perhitungan subsidi pupuk di PT Petrokimia Gresik menggunakan kuantum salur atau besaran volume penyaluran, dan menghasilkan data yang menunjukkan perkembangan perhitungan subsidi pupuk untuk tahun 2019 dan 2020. Perhitungan yang terdapat pada data tidak diberi penjelasan tentang jenis kuantum yang digunakan, sehingga dapat membingungkan dalam penghitungan untuk menentukan piutang subsidi yang akan ditagihkan. Penjelasan tentang jenis kuantum yang digunakan akan memudahkan dalam proses perhitungan subsidi pupuk. Perhitungan subsidi pupuk tersebut akan menimbulkan piutang subsidi yang akan ditagihkan kepada Pemerintah.

Kata Kunci : Subsidi Pupuk, Harga Pokok Penjualan, Harga Eceran Tertinggi.

ABSTRACT

PT Petrokimia Gresik is one of the State-Owned Enterprises (BUMN) which is engaged in the production of fertilizers and non-fertilizer production as a result of diversification and has the most complete fertilizer factory in Indonesia. Fertilizer subsidies have increased by 8.5% per year from 2016 to 2019. The company uses a fertilizer subsidy calculation whose amount is calculated based on the difference between the cost of goods sold (HPP) and the highest retail price (HET). The purpose of this study was to determine the calculation of fertilizer subsidies at PT Petrokimia Gresik. The method used in the preparation of this final project is a descriptive qualitative method with the process of collecting data through interviews and literature studies. Calculation of fertilizer subsidies at PT Petrokimia Gresik uses channel quantum, or distribution volume, and produces data showing the progress of fertilizer subsidy calculations for 2019 and 2020. The calculations contained in the data are not given an explanation of the type of quantum used, so it can be confusing in the calculation to determine the subsidy receivables to be billed. An explanation of the type of quantum used will make it easier to calculate the fertilizer subsidy. The calculation of the fertilizer subsidy will result in a subsidy receivable which will be billed to the government.

Keywords: *Fertilizer Subsidy, Cost of Goods Sold, Highest Retail Price.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Akuntansi Biaya	5
2.2 Subsidi pupuk.....	6
2.3 Harga Pokok Penjualan.....	7
2.4 Harga Eceran Tertinggi	8
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	10
3.1 Objek Penelitian.....	10
3.2 Waktu Penelitian	10
3.3 Metode Penelitian.....	11
BAB 4 PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	12
4.2 Pembahasan.....	15
4.3 Solusi.....	19
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	21

5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Lokasi PT Petrokimia Gresik	10
Gambar 4.1	Mutasi Saldo Piutang Subsidi.....	18
Gambar 4.2	Piutang Subsidi yang Belum Ditagih	18
Gambar 4.3	Alur Penagihan Piutang Subsidi.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	HPP Pupuk Bersubsidi yang Diproduksi Sendiri	8
Tabel 2.2	HPP Pupuk Bersubsidi yang Tidak Diproduksi Sendiri.....	8
Tabel 4.1	Tabel Rekapitulasi Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2019 ...	15
Tabel 4.2	Rekapitulasi Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2020	16

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Magang
- Lampiran 3. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi Tidak Diprosuksi Sendiri
- Lampiran 4. Data Rekapitulasi Subsidi Pupuk Tahun 2019
- Lampiran 5. Data Rekapitulasi Subsidi Pupuk Tahun 2020
- Lampiran 6. Mutasi Saldo Piutang Subsidi
- Lampiran 7. Alur Penagihan Piutang Subsidi
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup pesat, setelah sebelumnya terpuruk dikarenakan pandemi COVID-19. Pertumbuhan ini tentu dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sektor ekonomi memberikan peran yang sangat besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor industri memberikan kontribusi sebesar 21,31%, disusul sektor perdagangan sebesar 13,37%, sektor pertanian sebesar 13,41%, dan sektor pertambangan sebesar 11,06% (Armelly:2021). Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan (Hayati *et al.*:2017).

Sektor Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pupuk merupakan salah satu komponen penting dan sangat dibutuhkan di bidang pertanian di Indonesia. Pupuk digunakan untuk membantu tanaman untuk tetap tumbuh subur dan menghasilkan hasil panen yang berkualitas tinggi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatatkan pertumbuhan penjualan produk pupuk sepanjang kuartal I 2020, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Penjualan tersebut terdiri dari pupuk bersubsidi atau *Public Service Obligation* (PSO) dan pupuk komersial (non subsidi). Produk pupuk tersebut berupa *Urea*, NPK, SP-36, ZA, ZK, KCL dan Organik. Penjualan total produk pupuk sampai dengan 31 Maret 2020 mencapai 3.508.970 ton yang terdiri dari 2.403.842 ton pupuk bersubsidi dan 1.105.128 ton pupuk komersil. Penjualan ini menandakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memajukan perekonomian di Indonesia.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Besarannya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET). Subsidi pupuk merupakan pos yang terbesar dimana dalam kurun waktu 2016-2019 rata-rata mengalami peningkatan hingga 8,5% per tahun. Pada tahun 2020, terdapat perubahan harga eceran tertinggi (HET) jika dibandingkan pada tahun 2019 yang menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020. Subsidi pupuk ini diharapkan dapat mempermudah para petani untuk keperluan pertaniannya dan menambah produktivitas. Kebijakan subsidi pupuk ini diharapkan dapat melindungi petani, dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani (Ragimun *et al.*,:2020).

Peningkatan tersebut membuat banyak perusahaan yang berlomba-lomba turut meningkatkan sektor pertanian di Indonesia, salah satunya PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan produk non pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Total produksi yang besar tersebut membuat PT Petrokimia Gresik bertransformasi menjadi perusahaan Solusi Agroindustri untuk mendukung tercapainya program Ketahanan Pangan Nasional dan kemajuan dunia pertanian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka laporan tugas akhir ini berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN SUBSIDI PUPUK TAHUN 2019 DAN 2020 PADA PT PETROKIMIA GRESIK”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik di tahun 2019?
2. Bagaimana perhitungan subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik di tahun 2020?
3. Bagaimana perbandingan perhitungan subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik antara tahun 2019 dengan tahun 2020?
4. Apa yang menjadi faktor utama naik dan turunnya nilai subsidi yang akan ditagihkan kepada pemerintah?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perhitungan subsidi pupuk yang diterapkan di PT Petrokimia Gresik tahun 2019.
2. Untuk memahami perhitungan subsidi pupuk yang diterapkan di PT Petrokimia Gresik tahun 2020.
3. Untuk mengetahui perbandingan subsidi pupuk di PT Petrokimia Gresik antara 2019 hingga 2020.
4. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya nilai subsidi yang akan ditagihkan kepada pemerintah.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa pelaksana penelitian:
 - a. Mengetahui masalah yang muncul di bidang akuntansi yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik.
 - b. Mengerti dan memahami tugas serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan di PT Petrokimia Gresik.
 - c. Dapat mengetahui dan membangun etika yang baik di dalam dunia kerja.

- d. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan sesuai dengan bidang akuntansi.
- 2. Bagi jurusan D-III Akuntansi Universitas Airlangga :
 - a. Dapat menjalin kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D-III Akuntansi dengan PT Petrokimia Gresik
 - b. Sebagai sarana pengenalan instansi Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya Program Studi Akuntansi (D-III Akuntansi) kepada perusahaan.
- 3. Bagi PT Petrokimia Gresik :
 - a. Membangun kerjasama yang baik antara PT Petrokimia Gresik dengan Universitas Airlangga khususnya Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Program Studi Diploma III Akuntansi.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang dunia kerja dan tanggung jawab yang harus dibangun melalui mahasiswa.
- 4. Bagi Pembaca :
Menambah wawasan tentang akuntansi biaya kepada pembaca.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi, sama halnya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak dan sebagainya. Akuntansi biaya mengkaji data biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan informasi akuntansi. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu.

Akuntansi biaya secara luas dianggap sebagai cara perhitungan atas nilai persediaan yang dilaporkan di neraca dan harga pokok penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi. Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi (Lasut:2015). Pandangan ini membatasi cakupan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan menjadi sekedar data biaya produk guna memenuhi aturan pelaporan eksternal. Definisi yang terbatas seperti itu tidak sesuai untuk masa sekarang dan tidak cukup menggambarkan kegunaan informasi biaya. Akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan untuk aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas dan efisiensi serta membuat keputusan yang bersifat rutin dan strategis. Pengumpulan, presensi dan analisis dari informasi mengenai biaya dan keuntungan akan membantu manajemen menyelesaikan tugas berikut:

1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk operasi dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Suatu aspek penting dari rencana adalah potensi untuk memotivasi manusia untuk berkinerja secara konsisten dengan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.

3. Mengendalikan kualitas fisik dari persediaan dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan, untuk tujuan penetapan harga dan evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen atau divisi.

2.2 Subsidi pupuk

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari Pemerintah Indonesia untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar Program Pemerintah. Pemberian pupuk bersubsidi ini harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah direncanakan yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Pupuk bersubsidi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pengadaan pupuk bersubsidi ini tentu diharapkan dapat membantu para petani dan memajukan sektor pertanian di Indonesia. Pupuk menjadi salah satu faktor yang penting dalam pertanian, ini yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pendistribusian yang merata ke seluruh Indonesia, berbagai upaya dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap daerah di Indonesia serta optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Pendistribusian pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang menjelaskan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara Nasional dari Lini I sampai dengan Lini IV. Petani harus bergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani di wilayahnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Tata cara pemberian subsidi pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Besaran subsidi pupuk yang diberikan oleh Pemerintah adalah berdasarkan selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gedung produsen atau distributor di wilayah Kabupaten atau Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. Rumus perhitungan subsidi pupuk sebagai berikut:

$$\text{SUBSIDI PUPUK} = \text{Kwt} \times (\text{HPP} - \text{HET})$$

Kwt = Kuantum Penyaluran s.d Lini IV

HPP = Harga Pokok Penjualan s.d Lini IV

HET = Harga Eceran Tertinggi Lini IV

2.3 Harga Pokok Penjualan

HPP merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Perhitungan ini dibuat agar perusahaan dapat mengetahui detail biaya dari produk tersebut. HPP akan memperlihatkan perusahaan mengenai keuntungan yang bisa didapatkan. HPP Pupuk Bersubsidi Lini IV merupakan jumlah pengeluaran atau biaya untuk memproduksi pupuk bersubsidi dari perhitungan biaya produksi hingga biaya penyaluran. HPP Pupuk Bersubsidi Lini IV memiliki komponen yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) Sektor Pertanian yaitu seperti pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. Garis besar HPP pupuk bersubsidi dibedakan menjadi dua HPP yang diproduksi sendiri dan HPP yang tidak diproduksi sendiri. Pupuk Organik yang

diperoleh dari investor termasuk dalam HPP yang tidak diproduksi sendiri dan mendapatkan profit margin 3%.

Tabel 2.1 HPP Pupuk Bersubsidi yang Diproduksi Sendiri

A. Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi yang Diproduksi Sendiri				
1. Produksi FOT /FOB		2. Biaya Penyaluran s.d Lini III		3. Profit Margin 10%
a. Biaya Bahan Baku		a. Biaya Kapal Curah/Freight		4. Penggantian Biaya
b. Biaya Air Baku		Kapal Curah		Penyaluran Dari Lini III
c. Biaya Bahan		b. Biaya Kapal Kantong/Freight		Ke Lini IV
Penolong		Kapal Kantong		5. PPN 10%
d. Biaya Pegawai		c. Biaya Survey		
e. Biaya		d. Biaya Bongkar Muat Lini II		
Pemeliharaan dan		e. Biaya Sewa/Stapel Gudang		
Suku Cadang		Lini II		
f. Biaya Asuransi dan		f. Biaya Angkut Lini II Ke Lini	+	
Jasa	+	III		
g. Biaya Administrasi		g. Biaya Bongkar Muat Lini III		
Umum		h. Biaya Sewa/Stapel Gudang		
h. Biaya Depresiasi		Lini III		
dan Amortisasi		i. Biaya Administrasi dan		
i. Biaya Bunga dan		Umum s/d Lini III		
Bank				
j. Biaya Kantong dan				
Pengantongan				
k. Biaya Handling di				
Pabrik				

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020

Tabel 2.2 HPP Pupuk Bersubsidi yang Tidak Diproduksi Sendiri

B. Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi yang Tidak Diproduksi Sendiri				
1. Biaya Penyediaan Pupuk		2. Biaya Penyaluran S.D Lini III		3. Profit Margin 3%
a. Harga Pembelian		a. Biaya Keuangan		4. Penggantian Biaya
b. Landed Cost		b. Biaya Kapal Kantong/Freight		Penyaluran dari Lini III
c. Kantor dan		Kapal Kantong		ke Lini IV
Pengantongan		c. Biaya Survey		5. PPN 10%
d. Sewa Gudang		d. Biaya Bongkar/Muat Lini II		
e. Biaya Overhead		e. Biaya Sewa/Stapel Gudang		
(Administrasi &		Lini II		
Umum)	+	f. Biaya Angkut Lini II ke Lini	+	
		III		
		g. Biaya Bongkar Muat Lini III		
		h. Biaya Sewa/Stapel Gudang		
		Lini III		
		i. Biaya Overhead (Penjualan)		

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020

2.4 Harga Eceran Tertinggi

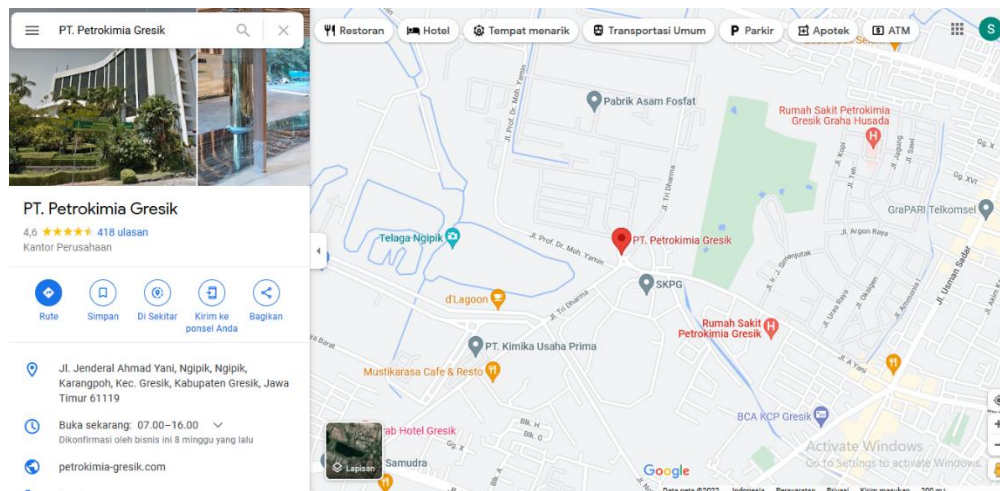
HET merupakan harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kawasan tertentu. HET ini diharapkan dapat

membantu para petani dalam mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Indikator HET yang tidak efektif adalah bila harga riil pupuk yang dibayar petani lebih tinggi dari HET yang berlaku . Lini IV merupakan tempat penyimpanan pupuk kios pengecer resmi yang melakukan penjualan pupuk kepada petani. HET untuk tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020, untuk tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020. HET ini nilainya tetap untuk sepanjang tahun mengikuti keputusan Menteri Pertanian yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Selisih dari harga pokok penjualan dari Lini IV dan HET ini nantinya akan menjadi piutang subsidi dari Lini IV kepada Pemerintah. HET pada tahun 2020 untuk pupuk *Urea* sebesar Rp. 1.800,-/kg, pupuk SP-36 sebesar Rp. 2.000,-/kg, pupuk ZA sebesar Rp. 1.400,-/kg, pupuk NPK sebesar Rp. 2.300,-/kg, pupuk NPK formula khusus sebesar Rp. 3.000,-/kg, dan pupuk Organik sebesar Rp. 500,-/kg.

BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek Penelitian

Gambar 3.1 merupakan peta lokasi PT Petrokimia Gresik yang menjadi tempat penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. Penelitian ini dilakukan di PT Petrokimia Gresik yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Gresik 61119, Jawa Timur. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang produksi pupuk dan produksi non pupuk hasil diversifikasi. Objek yang akan diteliti adalah perhitungan subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik tahun 2019 dan tahun 2020.



Gambar 3.1 Lokasi PT Petrokimia Gresik
Sumber: Google Maps, 2022.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu empat bulan, terhitung mulai bulan Februari hingga bulan Mei 2022. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan hari kerja efektif perusahaan yaitu selama lima hari setiap minggunya dan dilakukan secara daring atau online, baik melalui *zoom*, *whatsapp*, ataupun *google meet*. Data yang digunakan untuk menyusun Tugas Akhir diambil dari *annual report* tahunan yang ada di website resmi PT Petrokimia Gresik.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Proses pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara atau tanya jawab dengan pembimbing yang ada di departemen akuntansi biaya di PT Petrokimia Gresik.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka adalah dengan mencari, membaca, dan mempelajari referensi yang ada dalam data, buku, maupun jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

4.1.1 Perhitungan Harga Pokok Penjualan

HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dimulai dari proses pembuatan produk hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan ke pasaran. HPP merupakan nilai produk setelah diperhitungkan seluruh biaya sepanjang pembuatan produk serta keuntungan diinginkan. HPP merupakan salah satu unsur terpenting dalam produksi barang dan jasa, perhitungan ini dibuat agar perusahaan dapat mengetahui detail biaya dari produk tersebut. HPP juga menjadi acuan sebuah perusahaan dalam menentukan kisaran laba atau keuntungan yang dihasilkan. Perhitungan HPP yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa tahap:

1. Pembentukan Pusat Biaya (*Cost Center*)

Pusat biaya dapat diartikan sebagai unit atau departemen atau peran berbeda dalam kerangka perusahaan dan tidak menghasilkan pendapatan sendiri, namun secara tidak langsung berkontribusi pada keuntungan suatu organisasi. Pusat biaya adalah bentuk segmen terkecil dari aktivitas atau pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggungjawab dalam mengendalikan biaya-biaya yang terjadi didalamnya tanpa menghubungkan dengan nilai uang dari keluaran yang dihasilkan (Sudibyo:2017). Kelompok pusat biaya penjualan merupakan salah satu kelompok pusat biaya yang ada di PT Petrokimia Gresik, kelompok ini berada dibawah direktorat penjualan yang berkontribusi pada kegiatan penjualan dan pemasaran serta menjadi penyusun komponen biaya penjualan.

2. Pembentukan order produksi dan pemeliharaan

Order yang dimaksud disini adalah tempat untuk menampung biaya-biaya yang dapat langsung tertelusur dalam suatu kegiatan produksi atau pemeliharaan. Biaya yang termasuk dalam order produksi terdapat dalam *Bill of Material* (BOM) yang digunakan oleh suatu proses produksi. BOM merupakan

daftar lengkap di semua item yang dibutuhkan untuk membangun sebuah produk, BOM lebih dari daftar belanjaan, tetapi daftar semua produksi dan kebutuhan perakitan suatu barang, seperti bahan utilitas dan bahan *packaging*. Biaya yang termasuk dalam order pemeliharaan adalah penggunaan *sparepart* dan jasa eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan.

3. Penetapan dasar alokasi biaya

Alokasi biaya merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menetapkan biaya ke objek biaya seperti departemen, produk, program, atau cabang perusahaan. Alokasi biaya yang dialokasikan dengan ketentuan yang benar dapat melacak objek biaya tertentu yang menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi sebuah bisnis. Pengalokasian biaya dari suatu pusat biaya ke pusat biaya lainnya dilakukan dengan dasar alokasi tertentu, hal ini telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sebab akibat, manfaat yang diterima, keadilan atau kewajiban, dan kemampuan memikul biaya. Dasar alokasi biaya dapat dibagi menjadi dua bagian besar:

- a. Jumlah gaji dan kesejahteraan karyawan
- b. Aset yang terbagi menjadi:
 - 1) Aset tetap, berupa nilai bangunan dan mesin dalam valuta asing, nilai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) investasi bangunan dan mesin, nilai komputer dan jam pemakaian alat berat dikali harga perolehan.
 - 2) Aset lancar, berupa aktivitas bongkar muat, nilai bahan baku, nilai barang jadi untuk dijual, dan nilai produksi.

4. Perhitungan presentase alokasi biaya pusat biaya pelayanan dan pendukung

Presentase alokasi biaya dihitung berdasarkan data-data pendukung yang telah diperoleh, perhitungan harga pokok produksi dan perhitungan total biaya ini menggunakan metode alokasi langsung. Biaya Overhead Pabrik (BOP) departemen jasa dalam metode ini dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh

departemen produksi, dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut (Departemen Jasa tidak memakai jasanya).

Proses Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan proses alokasi dari cost center pemeliharaan ke masing-masing order pemeliharaan yang timbul.
2. Proses *settlement* biaya yang terakumulasi pada order pemeliharaan ke pusat biaya produksi yang mendapat pemeliharaan.
3. Melakukan proses alokasi biaya pada pusat biaya pelayanan dan pendukung menuju pusat biaya produksi dengan menggunakan metode langsung.
4. Melakukan proses alokasi biaya yang terakumulasi dalam cost center produksi ke masing-masing order produksi yang timbul pada masing-masing cost center.
5. Melakukan proses *settlement* biaya (asli dan eks alokasi) yang terakumulasi pada order produksi menjadi *Cost of Good Manufacture* (COGM) atau Harga Pokok Produksi.
6. Melakukan proses *actual costing* untuk mendistribusikan biaya yang ada ke persediaan akhir, *Cost of Good Sold* (COGS), susut dan promosi.

4.1.2 Piutang Subsidi

Piutang subsidi merupakan piutang yang ditagihkan kepada pemerintah atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Pupuk yang disubsidi oleh pemerintah antara lain, *Urea*, *ZA*, *SP-36*, *NPK Phonska*, *Petroganik*. Akun piutang ini pisahkan saat ada di neraca keuangan, ini bertujuan agar mengetahui lebih jelas target pengelolaan piutang yang harus diselesaikan oleh PT Petrokimia Gresik. Piutang subsidi ini terhitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan dengan HET dan dikalikan dengan kuantum salur.

4.2 Pembahasan

Komponen yang digunakan dalam perhitungan nilai subsidi pada PT Petrokimia Gresik yaitu kuantum salur atau besaran volume pupuk yang telah disalurkan, HPP Lini IV yang komponennya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) Sektor Pertanian, HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tarif atau besaran selisih antara HPP Lini IV dengan HET. Tarif ini nantinya akan dikalikan dengan kuantum sehingga menghasilkan nilai subsidi. Nilai subsidi *exclusive* PPN akan diterima dan dicatat oleh PT Petrokimia Gresik, dan nilai subsidi *inclusive* PPN merupakan nilai subsidi yang ditambah dengan PPN sebesar 10% dan akan ditagihkan kepada pemerintah. Nilai subsidi *inclusive* PPN ditagihkan kepada pemerintah karena nilai PPN 10% tersebut akan ditanggung dan dipungut langsung oleh pemerintah.

4.2.1 Perhitungan Subsidi Pupuk 2019

Tabel 4.1 Tabel Rekapitulasi Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2019

JENIS PUPUK	KUANTUM	PERHITUNGAN SUBSIDI			NILAI SUBSIDI	
		HPP LINI IV	HET	TARIF	INCLUSIVE PPN	EXCLUSIVE PPN
Urea	608.463	5.160.425	1.800.000	3.360.425	2.044.693.498.518	1.858.812.271.380
ZA	968.579	3.432.600	1.400.000	2.032.600	1.968.733.137.239	1.789.757.397.490
SP36	772.320	5.463.188	2.000.000	3.463.188	2.674.690.094.726	2.431.536.449.751
Phonska	1.976.229	6.654.344	2.300.000	4.354.344	8.605.179.147.713	7.822.890.134.284
Petroganik	657.052	2.039.457	500.000	1.539.457	1.011.503.902.740	919.549.002.491
Total	4.982.643				16.304.799.780.936	14.822.545.255.396

Sumber: Data Internal Perusahaan 2022

Tabel 4.1 menunjukkan perhitungan subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik pada tahun 2019, data diatas menunjukkan HPP Lini IV dari pupuk *Urea* adalah sebesar Rp 5.160.425 per ton dan HET yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.800.000 per ton, sehingga ditemukan selisih harga sebesar Rp 3.360.425 per ton. Selisih dari hasil pengurangan ini akan dikalikan dengan Kuantum sampai dengan lini IV sebesar 608.463 ton. Nilai subsidi yang akan dihasilkan dari perhitungan tersebut adalah sebesar Rp 1,8 triliun *exclusive* PPN, dan Rp 2 triliun *inclusive* PPN.

Data diatas juga menunjukkan HPP Lini IV dari pupuk SP-36 adalah sebesar Rp 5.463.188 per ton dan HET yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.000.000 per

ton, sehingga selisih harga yang ditemukan adalah sebesar Rp 3.463.188 per ton. Hasil pengurangan ini akan dikalikan dengan Kuantum sampai dengan Lini IV sebesar 772.320 ton. Nilai subsidi yang dihasilkan dari perhitungan tersebut adalah Rp 2,4 triliun *exclusive* PPN, dan Rp 2,6 triliun *inclusive* PPN.

4.2.2 Perhitungan Subsidi Pupuk 2020

Tabel 4.2 Rekapitulasi Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2020

JENIS PUPUK	KUANTUM	PERHITUNGAN SUBSIDI			NILAI SUBSIDI	
		HPP LINI IV	HET	TARIF	<i>INCLUSIVE</i> PPN	<i>EXCLUSIVE</i> PPN
<i>Urea</i>	680.378	4.919.405	1.800.000	3.119.405	2.122.373.333.545	1.929.430.303.223
ZA	818.910	3.225.105	1.400.000	1.825.105	1.494.596.443.802	1.358.724.039.820
SP36	590.258	5.765.938	2.000.000	3.765.938	2.222.875.655.816	2.020.796.050.742
Phonska	2.220.523	6.198.230	2.300.000	3.898.230	8.656.109.650.123	7.869.190.591.021
Petroganik	557.234	1.994.703	500.000	1.494.703	832.900.011.991	757.181.829.082
Total	4.867.303				15.328.855.095.278	13.935.322.813.889

Sumber: Data Internal Perusahaan 2022

Tabel 4.2 menunjukkan perhitungan subsidi pupuk pada tahun 2020, jenis pupuk *Urea* memiliki HPP Lini IV sebesar Rp 4.919.405 per ton lalu HET yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.800.000 per ton. Perhitungan antara HPP Lini IV dan HET ini menimbulkan selisih sebesar Rp 3.119.405 per ton, selanjutnya selisih dari HPP Lini IV dan HET ini akan dikalikan dengan kuantum *Urea* yaitu sebesar 680.378 ton. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai subsidi sebesar Rp 1,9 triliun *exclusive* PPN, dan Rp 2,1 triliun *inclusive* PPN.

Kuantum untuk pupuk SP-36 sebesar 590.258 ton, dengan HPP Lini IV sebesar Rp 5.765.938 per ton dan HET sebesar Rp 2.000.000 per ton. Perhitungan antara HPP Lini IV dan HET ini menimbulkan selisih sebesar Rp 3.765.938 per ton. Selisih ini selanjutnya akan dikalikan dengan kuantum pupuk ZA dan menghasilkan nilai subsidi sebesar Rp 2,02 triliun *exclusive* PPN dan nilai subsidi sebesar Rp 2,2 triliun *inclusive* dengan PPN.

4.2.3 Perbandingan subsidi pupuk tahun 2019 dan 2020

Pembahasan perhitungan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dan penurunan kuantum salur dan HPP Lini IV pada beberapa jenis pupuk antara tahun 2019 dan 2020. Pupuk jenis *Urea* mengalami

peningkatan kuantum salur sebesar 71.915 ton, yaitu 608.463 ton pada tahun 2019 menjadi 680.378 ton pada tahun 2020. Pupuk jenis SP-36 mengalami penurunan pada kuantum salur sebesar 182.062 ton, pada tahun 2019 sebesar 772.320 ton menjadi 590.258 ton pada tahun 2020.

HPP Lini IV pada tahun 2019 dan 2020 terdapat peningkatan dan penurunan HPP Lini IV untuk jenis pupuk tertentu. HPP Lini IV untuk jenis pupuk Urea mengalami penurunan sebesar Rp 241.020 per ton, sedangkan untuk jenis pupuk SP-36 mengalami peningkatan sebesar Rp 302.938 per ton. HET yang digunakan memiliki nilai yang sama, sehingga peningkatan dan penurunan tarif pupuk bersubsidi tersebut dipengaruhi oleh naik dan turunnya besaran kuantum salur, dan HPP Lini IV yang mengalami peningkatan dan penurunan untuk jenis pupuk tertentu.

Peningkatan dan penurunan ini akan berdampak pada nilai subsidi yang dihasilkan, mengingat besaran kuantum salur dan HPP Lini IV merupakan komponen yang penting dalam perhitungan subsidi pupuk. Peningkatan permintaan untuk pupuk jenis Urea dan penurunan pada jenis pupuk SP-36 juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan subsidi pupuk. Nilai subsidi yang mengalami peningkatan menandakan piutang subsidi mengalami peningkatan juga.

4.2.4 Piutang Subsidi

. Pembayaran dan pertanggungjawaban piutang subsidi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Piutang subsidi Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 4,2 triliun atau 10,22% dari jumlah aset. Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 6,7 triliun atau 14,95% dari jumlah aset.

	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019 ^{*)}	1 Januari/ January 2019 ^{*)}	
Saldo awal	7,471,169	6,386,760	4,306,023	Beginning balance
Penyesuaian	-	-	-	Adjustment
Pembayaran kepada Pemerintah	-	-	993,524	Payment to the Government
PPN atas pembayaran	-	-	99,352	VAT related to payments
Subsidi Pemerintah (Catatan 22)	14,036,044	14,731,152	14,533,491	Government subsidy (Note 22)
PPN atas pendapatan	1,403,604	1,473,115	1,453,349	VAT related to revenue
Penerimaan dari Pemerintah	(16,508,007)	(13,711,721)	(13,554,610)	Receipts from Government
PPN atas penerimaan	(1,650,800)	(1,371,172)	(1,355,461)	VAT related to settlements
PPh 22 atas penerimaan	(97,427)	(36,965)	(88,908)	Tax article 22 related to settlements
Dikurangi:				Less:
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(423,144)	(679,197)	(580,615)	VAT out payable from unpaid subsidy receivables
Piutang subsidi - bersih	4,231,439	6,791,972	5,806,145	Subsidy receivables - net

*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (lihat Catatan 3)

As restated and reclassified (refer to Note 3) *)

Gambar 4.1 Mutasi Saldo Piutang Subsidi

Sumber: Data Internal Perusahaan 2022

Gambar di atas merupakan estimasi piutang subsidi atas penyaluran pupuk untuk tahun 2020. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, karena pihak debitur adalah Pemerintah Indonesia dan akan memperoleh penggantian bunga atas keterlambatan pelunasan piutang subsidi. Tahun 2020 terdapat 97.957 ton pendapatan pupuk subsidi yang masih dalam proses penelusuran kelengkapan bukti oleh BPK-RI.

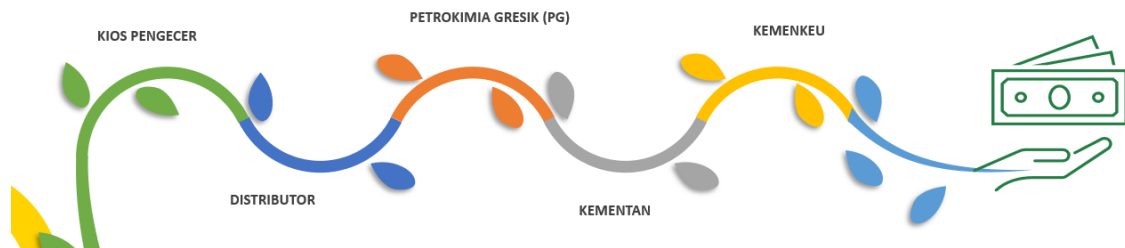
	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019 ^{*)}	1 Januari/ January 2019 ^{*)}	
Piutang Subsidi belum ditagihkan	312,965	1,109,996	368,024	Unbilled subsidy receivable
Dikurangi :				Less :
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum ditagih	(28,451)	(100,908)	(33,456)	VAT out payable from unbilled subsidy receivables
Jumlah	284,514	1,009,088	334,568	Total

Gambar 4.2 Piutang Subsidi yang Belum Ditagih

Sumber: Data Internal Perusahaan 2022

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan penjualan pupuk bersubsidi namun belum tersalur ke petani dan masih ada di distributor, dan akan diakui sebagai pendapatan pupuk bersubsidi pada saat pupuk bersubsidi tersalurkan ke petani. Gambar diatas menunjukkan piutang subsidi belum ditagihkan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 312 miliar, lalu dikurangi dengan utang PPN

keluaran sebesar Rp 28 miliar sehingga menghasilkan jumlah sebesar Rp 284 miliar. Per tanggal 31 Desember 2019 piutang subsidi belum ditagihkan sebesar Rp 1,1 triliun, lalu dikurangi dengan utang PPN keluaran sebesar Rp 100 miliar sehingga menghasilkan jumlah Rp 1 triliun.



Gambar 4.3 Alur Penagihan Piutang Subsidi

Sumber: Data Internal Perusahaan 2022

Alur penagihan subsidi pupuk kepada pemerintah dapat dilihat pada gambar 4.3, dimulai dari kios pengecer yang menyalurkan pupuk dan melaporkan penyalurannya kepada distributor, lalu distributor akan melaporkan penyaluran dari kios dan mengajukan verifikasi kepada Tim Kecamatan. PT Petrokimia Gresik akan menagihkan penyaluran dari seluruh distributor dan meminta verifikasi atas dokumen penyaluran kepada Kementerian Pertanian, selanjutnya Kementerian Pertanian akan melakukan verifikasi dokumen penyaluran distributor dan menyampaikan hasil verifikasi untuk proses pembayaran. Kementerian Keuangan akan melakukan pembayaran subsidi pupuk sesuai pengajuan pembayaran dari Kementerian Pertanian.

4.3 Solusi

HPP Lini IV disesuaikan dengan menurunkan HPP sebesar 5% sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Keuangan menjadi salah satu cara untuk menekankan HPP Lini IV, sehingga tarif yang dihasilkan tidak terlalu tinggi dan pembayaran terhadap piutang subsidi dapat segera terselesaikan oleh pemerintah. Ketidaktercapaian kuantum penyaluran pupuk bersubsidi merupakan salah satu risiko yang paling

mungkin terjadi, hal ini dapat diminimalisir dengan mendorong distributor dan kios untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai alokasi. Penjelasan mengenai jenis kuantum yang digunakan dalam data rekapitulasi perhitungan subsidi pupuk akan sangat membantu dalam proses perhitungan, karena untuk kuantum jual, perhitungan yang digunakan berdasarkan besaran jumlah dari sales ke distributor, dan untuk kuantum salur berdasarkan jumlah pagu per wilayah serta kebutuhan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan dalam penelitian ini membentuk beberapa kesimpulan sesuai dengan topik pembahasan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2019 dan 2020 Pada PT Petrokimia Gresik” sebagai berikut:

1. Perhitungan subsidi pupuk tahun 2019 menunjukkan nilai subsidi yang akan ditagihkan kepada Pemerintah sebesar Rp 2,04 triliun untuk jenis pupuk *Urea* dengan kuantum salur sebesar 608.463 ton dengan HPP Lini IV Rp 5.160.425 per ton, dan Rp 2,6 triliun untuk jenis pupuk SP-36 dengan kuantum salur sebesar 772.320 ton dengan HPP Lini IV Rp 5.463.188 per ton.
2. Perhitungan subsidi pupuk tahun 2020 menunjukkan nilai subsidi yang akan ditagihkan kepada Pemerintah sebesar Rp 2,1 triliun untuk jenis pupuk *Urea* dengan kuantum salur sebesar 680.378 ton dengan HPP Lini IV Rp 4.919.405 per ton, dan Rp 2,2 triliun untuk jenis pupuk SP-36 dengan kuantum salur sebesar 590.258 ton dengan HPP Lini IV Rp 5.765.938 per ton.
3. Terdapat peningkatan dan penurunan kuantum salur dan HPP Lini IV pada beberapa jenis pupuk antara tahun 2019 dan 2020. Pupuk jenis *Urea* mengalami peningkatan kuantum salur sebesar 71.915 ton, pupuk jenis SP-36 mengalami penurunan pada kuantum salur sebesar 182.062. HPP Lini IV untuk jenis pupuk *Urea* mengalami penurunan sebesar Rp 241.020 per ton, sedangkan untuk jenis pupuk SP-36 mengalami peningkatan sebesar Rp 302.938 per ton.
4. Besaran Kuantum dan HPP Lini IV menjadi faktor penting dalam perhitungan subsidi pupuk guna menentukan besaran nilai subsidi yang dihasilkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong distributor dan kios untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai alokasi.
2. Tetap melakukan perhitungan dengan menggunakan ketentuan yang terkait dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang menjelaskan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara Nasional dari Lini I sampai dengan Lini IV.
3. Melakukan perincian terkait perhitungan HPP sehingga dapat diketahui penyebab meningkatnya HPP Lini IV.

DAFTAR PUSTAKA

- Armelly, Muhammad Rusdi dan Esti Pasaribu. 2021. *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia : Model Input-Output*. Vol 16 No 2, (Oktober):119-134.
- Departemen Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk*. Kementerian Keuangan: Jakarta.
- Departemen Perdagangan. 2013. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Kementerian Perdagangan: Jakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2003. *Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan: Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2017. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018*. Kementerian Pertanian: Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2020. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Kementerian Pertanian: Jakarta.
- Hayati, Mimi, Elfiana dan Martina. 2017. *Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh*, 213-222.
- Lasut, Thelbic. 2015. *Analisis Biaya Produksi Dalam Rangka Penentuan Harga Jual Makanan Pada Rumah Makan Ragey Poppy Di Tomohon*. Vol 03 No 1, (Maret):43-51.
- Ragimun, Makmun dan Sigit Setiawan. 2020. *Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia*. Vol 10 No 1, (Januari):69-89.

- Sudibyo, Heru Harmadi. 2017. *Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pusat Biaya Untuk Menilai Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban*. Vol 40 No 56, (Mei):6539-6550.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286 Telp. 031-
5033869, 5053156, Fax. 99005114, Website: vokasi.unair.ac.id, email:
info@vokasi.unair.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)

Nama Mahasiswa : Safiera Insan Khamilia
NIM : 151910613007
Judul TA : Analisis Perhitungan Subsidi Pupuk Tahun 2019 dan 2020 Pada PT Petrokimia Gresik.
Dosen Pembimbing : Riska Nur Rosyidiana S.E., M.Ak.,CRA., CAPF

Tanggal	Topik Konsultasi	Saran Dosen	TTD Mahasiswa	TTD Pembimbing
03 Maret 2022	Penentuan tema yang akan digunakan untuk Tugas Akhir.	Tema yang akan digunakan bisa disesuaikan menurut bagian departemen yang digunakan sebagai tempat magang.		
07 Maret 2022	Penentuan judul yang digunakan untuk Tugas Akhir.	Judul yang akan digunakan diusahakan relevan dengan tema yang digunakan.		
14 Maret 2022	Bab 1 Pendahuluan.	Mengembangkan latar belakang, rumusan masalah serta kutipan.		
21 Maret 2022	Bab 2 Tinjauan Pustaka	Mengembangkan tinjauan pustaka serta penambahan kutipan pada beberapa sub bab.		
28 Maret 2022	Bab 3 Kajian Studi Kasus	Revisi terkait sumber gambar, waktu penelitian, serta metode penelitian.		
9 Mei 2022	Bab 4 Pembahasan	Progres untuk pembahasan pada bab 4		
16 Mei 2022	Bab 4 Pembahasan	Revisi terkait sub bab, dan kerangka yang kurang sesuai		
23 Mei 2022	Bab 5 Kesimpulan dan Saran	Kesimpulan bab 5 harus menjawab rumusan masalah		
6 Juni 2022	Bab 4 Pembahasan	Menambahkan solusi yang bisa digunakan dalam mengatasi risiko yang dapat terjadi		
13 Juni 2022	Format dan Kerangka Tugas Akhir	Revisi terkait judul tabel dan gambar, kesalahan penulisan kata, dan penambahan pada bagian abstrak		
16 Juni 2022	Daftar Pustaka	Tidak mencantumkan referensi yang tidak digunakan dalam Tugas Akhir		

Lampiran 2. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi yang Diproduksi Sendiri

A. Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi yang Diproduksi Sendiri				
6. Produksi FOT /FOB		7. Biaya Penyaluran s.d Lini III		8. Profit Margin 10%
l. Biaya Bahan Baku		j. Biaya Kapal Curah/Freight Kapal Curah		9. Penggantian Biaya Penyaluran Dari Lini III Ke Lini IV
m. Biaya Air Baku		k. Biaya Kapal Kantong/Freight Kapal Kantong		10. PPN 10%
n. Biaya Bahan Penolong		l. Biaya Survey		
o. Biaya Pegawai		m. Biaya Bongkar Muat Lini II		
p. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang		n. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini II		
q. Biaya Asuransi dan Jasa	+	o. Biaya Angkut Lini II Ke Lini III	+	
r. Biaya Administrasi Umum		p. Biaya Bongkar Muat Lini III		
s. Biaya Depresiasi dan Amortisasi		q. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III		
t. Biaya Bunga dan Bank		r. Biaya Administrasi dan Umum s/d Lini III		
u. Biaya Kantong dan Pengantongan				
v. Biaya Handling di Pabrik				

Lampiran 3. Komponen HPP Pupuk Bersubsidi Tidak Diprosuksi Sendiri

B. Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi yang Tidak Diproduksi Sendiri				
6. Biaya Penyediaan Pupuk		7. Biaya Penyaluran S.D Lini III		8. Profit Margin 3%
f. Harga Pembelian		j. Biaya Keuangan		9. Penggantian Biaya
g. Landed Cost		k. Biaya Kapal Kantong/Freight		Penyaluran dari Lini III
h. Kantor dan Pengantongan		Kapal Kantong		ke Lini IV
i. Sewa Gudang		l. Biaya Survey		10. PPN 10%
j. Biaya Overhead (Administrasi & Umum)	+	m. Biaya Bongkar/Muat Lini II	+	
		n. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini II		
		o. Biaya Angkut Lini II ke Lini III		
		p. Biaya Bongkar Muat Lini III		
		q. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III		
		r. Biaya Overhead (Penjualan)		

Lampiran 4. Data Rekapitulasi Subsidi Pupuk Tahun 2019

JENIS PUPUK	KUANTUM	PERHITUNGAN SUBSIDI			NILAI SUBSIDI	
		HPP LINI IV	HET	TARIF	<i>INCLUSIVE</i> PPN	<i>EXCLUSIVE</i> PPN
<i>Urea</i>	608.463	5.160.425	1.800.000	3.360.425	2.044.693.498.518	1.858.812.271.380
ZA	968.579	3.432.600	1.400.000	2.032.600	1.968.733.137.239	1.789.757.397.490
SP36	772.320	5.463.188	2.000.000	3.463.188	2.674.690.094.726	2.431.536.449.751
Phonska	1.976.229	6.654.344	2.300.000	4.354.344	8.605.179.147.713	7.822.890.134.284
Petroganik	657.052	2.039.457	500.000	1.539.457	1.011.503.902.740	919.549.002.491
Total	4.982.643				16.304.799.780.936	14.822.545.255.396

Lampiran 5. Data Rekapitulasi Subsidi Pupuk Tahun 2020

JENIS PUPUK	KUANTUM	PERHITUNGAN SUBSIDI			NILAI SUBSIDI	
		HPP LINI IV	HET	TARIF	<i>INCLUSIVE</i> PPN	<i>EXCLUSIVE</i> PPN
<i>Urea</i>	680.378	4.919.405	1.800.000	3.119.405	2.122.373.333.545	1.929.430.303.223
ZA	818.910	3.225.105	1.400.000	1.825.105	1.494.596.443.802	1.358.724.039.820
SP36	590.258	5.765.938	2.000.000	3.765.938	2.222.875.655.816	2.020.796.050.742
Phonska	2.220.523	6.198.230	2.300.000	3.898.230	8.656.109.650.123	7.869.190.591.021
Petroganik	557.234	1.994.703	500.000	1.494.703	832.900.011.991	757.181.829.082
Total	4.867.303				15.328.855.095.278	13.935.322.813.889

Lampiran 6. Mutasi Saldo Piutang Subsidi

	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019 ^{*)}	1 Januari/ January 2019 ^{*)}	
Saldo awal	7,471,169	6,386,760	4,306,023	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian	-	-	-	<i>Adjustment</i>
Pembayaran kepada Pemerintah	-	-	993,524	<i>Payment to the Government</i>
PPN atas pembayaran	-	-	99,352	<i>VAT related to payments</i>
Subsidi Pemerintah (Catatan 22)	14,036,044	14,731,152	14,533,491	<i>Government subsidy (Note 22)</i>
PPN atas pendapatan	1,403,604	1,473,115	1,453,349	<i>VAT related to revenue</i>
Penerimaan dari Pemerintah	(16,508,007)	(13,711,721)	(13,554,610)	<i>Receipts from Government</i>
PPN atas penerimaan	(1,650,800)	(1,371,172)	(1,355,461)	<i>VAT related to settlements</i>
PPh 22 atas penerimaan	(97,427)	(36,965)	(88,908)	<i>Tax article 22 related to settlements</i>
Dikurangi:				<i>Less:</i>
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(423,144)	(679,197)	(580,615)	<i>VAT out payable from unpaid subsidy receivables</i>
Piutang subsidi - bersih	<u>4,231,439</u>	<u>6,791,972</u>	<u>5,806,145</u>	<i>Subsidy receivables - net</i>
*) Disajikan kembali dan direklasifikasi (lihat Catatan 3)				<i>As restated and reclassified (refer to Note 3) *)</i>

Lampiran 7. Piutang Subsidi yang Belum Ditagih

	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019*)	1 Januari/ January 2019*)	
Piutang Subsidi belum ditagihkan	312,965	1,109,996	368,024	<i>Unbilled subsidy receivable</i>
Dikurangi :				<i>Less :</i>
Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum ditagih	(28,451)	(100,908)	(33,456)	<i>VAT out payable from unbilled subsidy receivables</i>
Jumlah	<u>284,514</u>	<u>1,009,088</u>	<u>334,568</u>	<i>Total</i>

Lampiran 7. Alur Penagihan Piutang Subsidi



Lampiran 8. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Waktu : 23 Maret 2022

Narasumber : Hanif Muttaqin, S.A.

Pelaksanaan wawancara ini via *online* melalui *whatsapp*.

Hasil Wawancara

Penulis :Assalamualaikum Pak Hanif, mohon maaf mengganggu waktunya, saya ijin bertanya apakah naik dan turunnya HET itu mempengaruhi jumlah produksi pupuk bersubsidi atau hanya berpengaruh pada harga jualnya saja pak?

Narasumber :Waalaikumsalam, untuk HET nilainya fix sepanjang tahun mengikuti Kepmentan yang diterbitkan kementerian. Nilai HET tergantung jumlah pupuk yang disalurkan ke petani, tidak dipengaruhi atau berpengaruh terhadap jumlah produksi maupun harga jual pupuk bersubsidi. Harga jual pupuk ke petani sebatas HET saja, selisih HPP Lini IV dan HET nantinya yang PT Petrokimia Gresik tagih ke pemerintah.

Narasumber :Formatnya ada di PERMENTAN No. 28 Tahun 2020

Penulis :Berarti selisihnya ini yang piutang subsidi kepada Pemerintah itu pak?

Narasumber :Iya

Penulis :Baik, terimakasih pak.